

EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Budi Mulyana

E-mail: budimulyana@pknstan.ac.id

Abstract

One of the important areas of change in bureaucratic reform agenda in Indonesia is performance accountability which is intended to promote a government management system that focuses on results-oriented performance improvement. The purpose of this research is to evaluate the factors causing Government of the Special Capital Region of Jakarta Province had not reached the targeted predicate until the 2019 Fiscal Year and formulate recommendations to improve its predicate in Performance Accountability. The research method used is a qualitative method, a case study approach. Data analysis was carried out based on documentation study, observation and focus group discussion (FGD). The research was conducted from September to December 2020.

Keywords: bureaucratic reform, performance, accountability, local government

PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan (*good governance*) yang baik adalah salah satu prasyarat utama untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode *Road Map* Reformasi Birokrasi nasional, yaitu *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. Periodisasi perjalanan reformasi birokrasi di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perkembangan paradigma ilmu administrasi dan tata kelola pemerintahan yang berkembang di dunia. Upaya perbaikan tata kelola pemerintah dilakukan dengan mencari paradigma terbaik yang dapat dipraktikkan di lapangan.

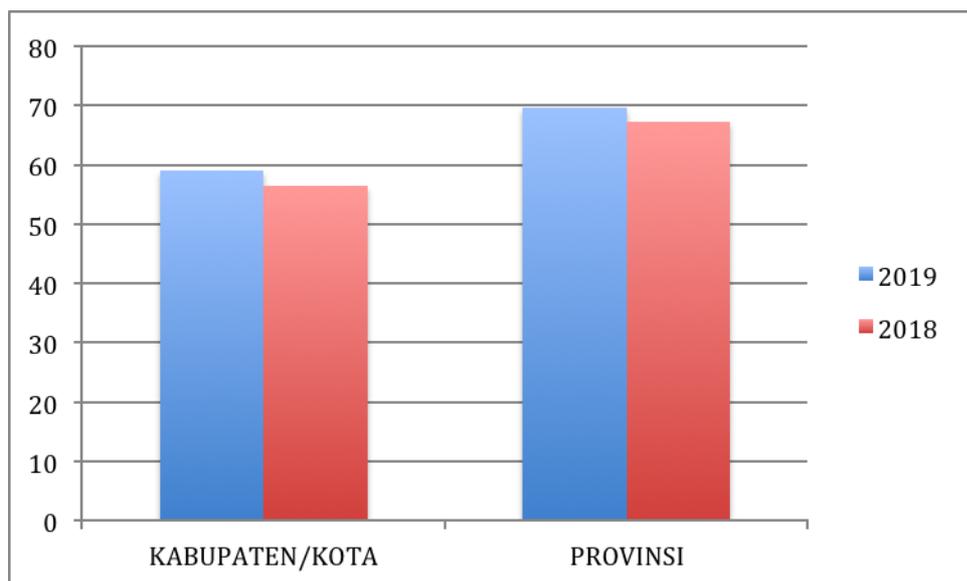
Secara umum, Indonesia mengarah pada praktik paradigma *New Public Management* (NPM), yang ditunjukkan dengan upaya menciptakan efektivitas, efisiensi, dan pemerintahan yang berorientasi pada hasil, serta *New Public Service* (NPS) yang ditunjukkan dengan keterlibatan aktor lain di luar pemerintah dalam kedudukan yang sama, seperti masyarakat sipil, dunia usaha, dan media masa. Meskipun demikian, pada beberapa kondisi Indonesia masih menerapkan beberapa praktik birokrasi weberian, khususnya dalam mengelola pelayanan yang bersifat strategis dan terkait dengan kedaulatan negara. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa pada saat ini di Indonesia, ketiga paradigma berjalan secara paralel dan digunakan secara kontekstual sesuai dengan kebutuhan dan kecocokannya. Tentunya, apapun paradigma yang digunakan, hasil yang ingin diwujudkan adalah birokrasi yang berkelas dunia.

Saat ini Reformasi Birokrasi telah masuk kepada periode ketiga atau terakhir dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010. Pada tahap akhir ini, Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Hal ini sebagaimana dinyatakan di dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Akuntabilitas dan kinerja organisasi publik telah menjadi aspek kunci dari pendekatan reformasi sektor publik. Bagi sebagian sarjana, akuntabilitas dan peningkatan kinerja sangat penting satu sama lain, yang berarti satu variabel dapat meningkatkan variabel lainnya. Asumsi keterkaitan antara akuntabilitas dan kinerja begitu kuat sehingga keduanya digunakan sebagai indikator satu sama lain: bertanggung jawab berarti memenuhi kinerja yang diharapkan dan bekerja sesuai standar adalah tanda yang jelas untuk bertanggung jawab (Dubnick dan Frederickson, 2011). Perhatian yang meningkat dengan kinerja diekspresikan melalui peningkatan yang kuat dari mekanisme audit, pemantauan dan evaluasi yang berfokus pada ekonomi, efektivitas, efisiensi dan '*value for money*' (Power, 1997).

Menurut keterangan yang disampaikan oleh Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo (2020), hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada tahun 2019 menunjukkan perbaikan yang ditunjukkan dengan peningkatan nilai rata-rata hasil evaluasi pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sebagaimana digambarkan pada gambar 1.1. di bawah ini.

Gambar 1.
Hasil Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi
Tahun 2018-2019



Sumber: Diolah dari artikel publikasian pada:
<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/efektivitas-dan-efisiensi-instansi-pemerintah-harus-dilakukan-secara-konsisten>

Untuk kabupaten/kota, secara nilai rata-ratanya dari hasil evaluasi AKIP mengalami peningkatan dari 56,53 di tahun 2018, menjadi 58,97 di tahun 2019. Namun demikian, secara nilai kategorinya belum ada peningkatan, karena masih di level kategori CC. Sedangkan untuk tingkat provinsi, nilai kategorinya satu level lebih baik dari kabupaten/kota, yaitu kategori B. Adapun nilai rata-ratanya untuk tingkat provinsi juga mengalami peningkatan yaitu dari 67,28 di tahun 2018 menjadi 69,63 di tahun 2019. Namun demikian, secara nilai kategorinya belum ada peningkatan, karena masih tetap di level kategori B.

Kategori nilai atau **predikat AKIP** berdasarkan hasil akhir evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PANRB) tersebut berpatokan pada ketentuan yang diatur di dalam Permen-PANRB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang secara lebih jelasnya dapat digambarkan pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1
Nilai Akhir Hasil Evaluasi AKIP

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 - 90	Memuaskan: memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70 - 80	Sangat Baik: akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kerja yang andal
4	B	>60 - 70	Baik: akuntabilitas kinerja baik, memiliki sistem untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50 - 60	Cukup: akuntabilitas kinerja cukup baik, memiliki sistem untuk manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan tetapi tidak mendasar.
6	C	>30 - 50	Kurang: sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tetapi perlu banyak perbaikan minor dan mendasar.
7	D	0 - 30	Sangat Kurang: sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Sumber: PermenPANRB No. 12 Tahun 2015

Analisis terhadap hasil evaluasi menunjukkan bahwa pemerintah daerah dengan kategori B ke bawah, memiliki potensi inefektivitas dan inefisiensi anggaran setidaknya sebesar 40 persen dari total APBD. Semakin tinggi nilai/kategori yang didapat, maka potensi inefektivitas dan inefisiensi anggaran semakin mengecil. Perbaikan hasil evaluasi tersebut juga sejalan dengan semakin besarnya potensi inefisiensi yang dapat dicegah oleh pemerintah daerah yang mengalami kenaikan kategori. Tercatat sebesar Rp41,15 triliun pada tahun 2017 dan Rp65,1 triliun pada tahun 2018 potensi pemborosan dapat dicegah. Sedangkan data sementara yang terkumpul di tahun 2019, potensi pemborosan yang dapat dicegah sebesar Rp5,7 triliun. Penurunan angka ini diakibatkan oleh upaya *refocusing* program pembangunan oleh sejumlah instansi

pemerintah sehingga menjadi lebih fokus, tepat sasaran, dan menyentuh masyarakat. (<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/efektivitas-dan-efisiensi-instansi-pemerintah-harus-dilakukan-secara-konsisten>).

Menurut Menteri Tjahjo Kumolo (2020), dengan diterapkannya SAKIP seluruh kegiatan dan program dapat disisir untuk mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang tidak efisien, belum fokus pada prioritas, masih menyentuh sasaran pinggir, belum terhujam langsung ke inti *outcome* akan dihapus dan anggaran dialihkan untuk program yang lebih penting seperti pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, serta pembangunan infrastruktur. Di samping itu, melalui SAKIP instansi pemerintah fokus pada pencapaian prioritas pembangunan nasional melalui perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, efektif, dan efisien serta monitoring dan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang dilakukan secara konsisten dan berkala. (<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/efektivitas-dan-efisiensi-instansi-pemerintah-harus-dilakukan-secara-konsisten>).

Mengingat pentingnya penyelenggaraan SAKIP dalam mendorong terwujudnya *good governance* dalam pemerintahan, sementara kondisi kualitas penyelenggaraan SAKIP di pemerintah daerah hingga saat ini (tahun 2019) untuk kabupaten/kota secara umum baru mencapai predikat ‘Kategori CC (Kurang)’, dan untuk pemerintah daerah provinsi baru mencapai predikat ‘Kategori B (Baik)’, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penyelenggaraan SAKIP pada sebuah pemerintah daerah, sehingga dapat menggali permasalahan dan kendala yang masih dihadapi di lapangan dan akhirnya penulis berharap dapat memberikan kontribusi pemikiran guna memberikan alternatif solusi yang implementatif.

Selanjutnya, penulis akan memilih lokus penelitian di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan pertimbangan bahwa sampai dengan akhir tahun anggaran 2019 Pemprov DKI Jakarta belum berhasil mencapai target predikat AKIP dengan nilai kategori sebagaimana ditargetkannya, yaitu predikat ‘Kategori A (Memuaskan)’. Sementara itu, bila dilihat dari sumber daya keuangannya, Pemprov DKI Jakarta memiliki kapasitas APBD yang relatif paling besar dibanding Pemda lainnya di Indonesia (misalnya, APBD TA 2019 sebesar Rp66 Triliun). Namun di sisi lain juga sebagai Daerah Khusus Ibukota, Pemprov DKI tentunya memiliki tantangan tersendiri dalam urusan pemerintahan dan tuntutan pelayanan publik yang lebih kompleks dan dinamis dibanding pemda lainnya.

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemprov DKI Jakarta dalam 4 tahun terakhir (Periode 2016 sd 2019), terdapat salah satu Sasaran Strategis Pemprov DKI Jakarta yang menjadi salah satu target utama kinerja setiap tahunnya, yaitu **‘Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel’**. Sasaran Strategis ini memiliki 3 (tiga) buah Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu: 1) Nilai Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), 2) Indeks Kepuasan Masyarakat dan 3) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dari ketiga IKU tersebut yang belum tercapai dalam 4 (empat) tahun terakhir yaitu Nilai Predikat AKIP. Adapun Nilai Predikat AKIP tersebut diberikan oleh Kement-PANRB setelah dilakukannya evaluasi terhadap AKIP Pemprov DKI Jakarta. Pada tabel 2. di bawah ini disajikan rekapitulasi capaian IKU untuk Sasaran Strategis tersebut.

Tabel 2
 Capaian IKU Sasaran Strategis
 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah
 yang Transparan dan Akuntabel Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 (2016-2019)

Tahun	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
2019	1) Nilai Predikat AKIP	A (81)	BB (73,84)	Belum Tercapai (91,16%)
	2) Indeks Kepuasan Masyarakat	81	84,41	Tercapai (101,75)
	3) Opini atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	Tercapai
2018	1) Nilai Predikat AKIP	A	BB (71,04)	Belum Tercapai (75%)
	2) Indeks Kepuasan Masyarakat	80	83,76	Tercapai (104,7%)
	3) Opini atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	Tercapai
2017	1) Nilai Predikat AKIP	BB	B (65,05)	Belum Tercapai (75%)
	2) Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A*	N/A	N/A
	3) Opini atas Laporan Keuangan	WTP	WDP	Belum Tercapai
2016	1) Nilai Predikat AKIP	BB	B (60,13)	Belum Tercapai
	2) Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A*	N/A	N/A
	3) Opini atas Laporan Keuangan	WTP	WDP	Belum Tercapai

Sumber: Diolah dari LKIP Pemprov DKI Jakarta Periode 2016 sd 2019.

*Keterangan:

Pada LKIP Tahun 2017 dan 2016 tidak ada keterangan mengenai target dan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengevaluasi faktor-faktor yang menyebabkan predikat AKIP pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga Tahun Anggaran 2019 belum mencapai target sebagaimana ditetapkan di dalam Sasaran Strategisnya; dan (2) merumuskan saran-saran perbaikan guna meningkatkan predikat/kualitas AKIP pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pendekatan studi kasus. Analisis data dilakukan berdasarkan studi dokumentasi, observasi dan *focus group discussion* (FGD). Penelitian dilaksanakan dalam periode September sd Desember 2020.

Studi dokumentasi dilakukan dengan menganalisis data sekunder terutama berupa dokumen perencanaan pembangunan pada Pemprov DKI Jakarta yang antara

lain meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategi (Rensta) dan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKIP) 2018-2019, dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Observasi dilakukan terhadap pemanfaatan aplikasi e-sakip dalam penyelenggaraan SAKIP di Pemprov DKI Jakarta.

Adapun FGD dilakukan secara on-line menggunakan aplikasi zoom, dengan informan/nara sumber yang dipilih secara *purposive sampling*. Pertimbangan pemilihan informan yaitu pada pentingnya peranan dan/atau keterlibatan dari masing-masing pihak di dalam penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Informan di dalam penelitian ini dan/atau dalam proses FGD umumnya berasal dari pihak internal Pemprov DKI Jakarta, dan ditambah dari pihak eksternal yaitu seseorang yang dianggap ahli di bidang manajemen kinerja instansi pemerintah. Secara spesifik, informan dimaksud berasal dari:

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu Bidang Perencanaan dan Pembangunan Tahunan (P2T), Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan yang memiliki tugas antara lain sebagai koordinator penyusunan perencanaan dan pengukuran kinerja SKPD di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Alasan pentingnya pihak Bappeda menjadi informan adalah karena Bappeda merupakan Koordinator Kinerja Organisasi (KKO) di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Informan dari Tim Bappeda dibawah koordinasi Ibu Driah Triastuti selaku Kasubid Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan.

- 2) Inspektorat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu Bidang/Subbidang yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) SKPD di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Alasan pentingnya pihak Inspektorat menjadi informan adalah karena Inspektorat bertugas melakukan Evaluasi terhadap LKIP dan penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Informan dari Inspektorat yaitu Bapak Ari Sufianto selaku anggota Evaluator SAKIP dan sekaligus anggota Tim Penyelenggara SAKIP di Pemprov DKI Jakarta.

- 3) Ahli/pakar di bidang manajemen kinerja organisasi pemerintahan, yaitu Bapak Suyuti Marzuki. Alasan pentingnya melibatkan Suyuti Marzuki, karena yang bersangkutan merupakan seorang konsultan yang direkrut oleh World Bank untuk memberikan bimbingan teknis untuk peningkatan kompetensi pegawai di bidang manajemen kinerja organisasi pada Pemprov DKI Jakarta.

HASIL PENELITIAN

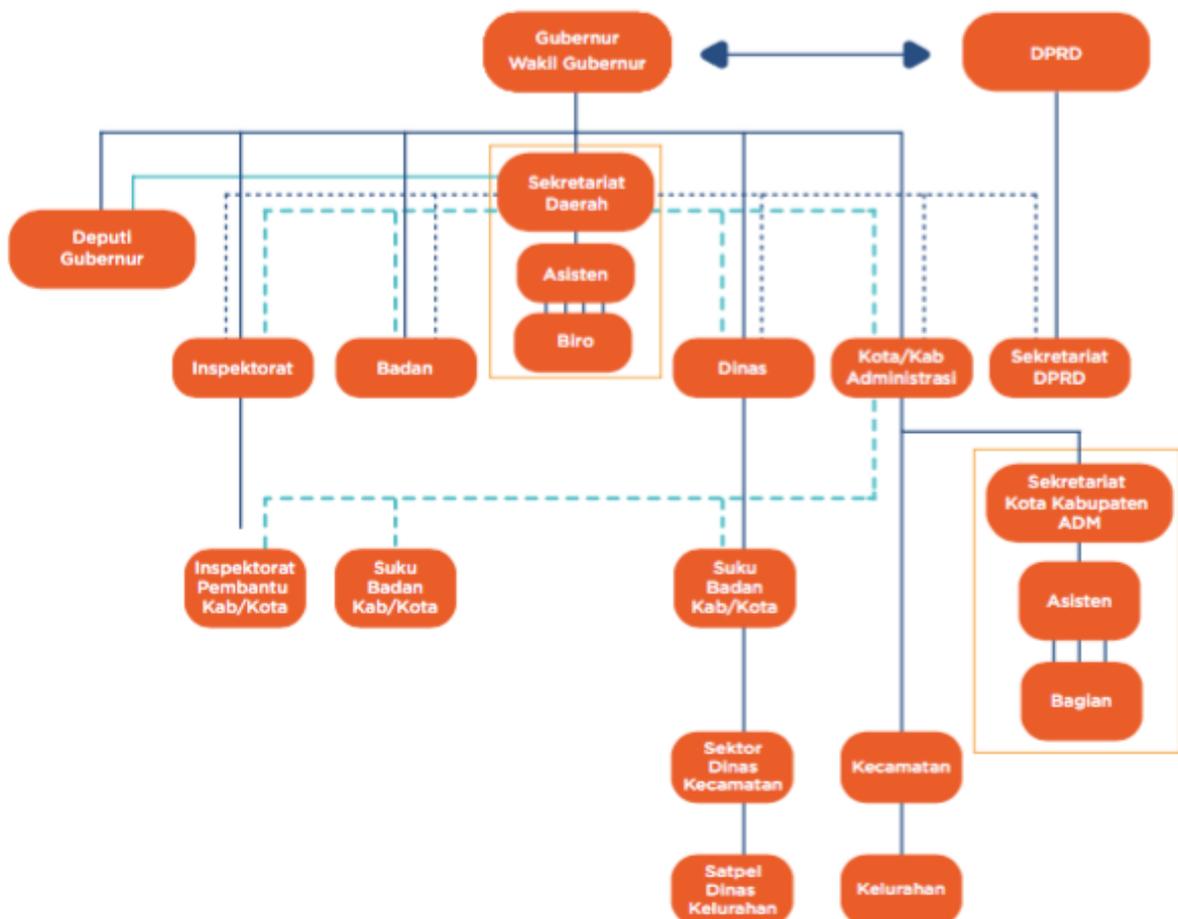
Sebagai upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan Reformasi Birokrasi, dilakukan penataan ulang organisasi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019, sebagai berikut.

Gambar 2
Perangkat Daerah pada Pemprov DKI Jakarta

1 SEKRETARIAT DAERAH	1 SEKRETARIAT DPRD	
1 INSPEKTORAT	10 BADAN	22 DINAS
1 SATPOL PP	5 KOTA	1 KABUPATEN

Struktur organisasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terdiri dari: Sekretariat Daerah yang membawahi 4 Asisten, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 22 Dinas, 10 Badan, 5 Kota Administrasi, dan 1 Kabupaten Administrasi. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Susunan kelembagaan tersebut efektif dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2017 hingga sampai saat ini. Adapun struktur organisasinya sebagai berikut:

Gambar 3
Struktur Organisasi Pemprov DKI Jakarta



Pada tahun 2017, penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi DKI Jakarta diselenggarakan untuk menetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta periode 2017-2022. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 2017-2022.

Berdasarkan RPJMD periode 2017-2022 Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta periode 2017-2022 adalah sebagai berikut:

“Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan peradaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua”

Dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas, disusun misi, yang merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan, melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut:

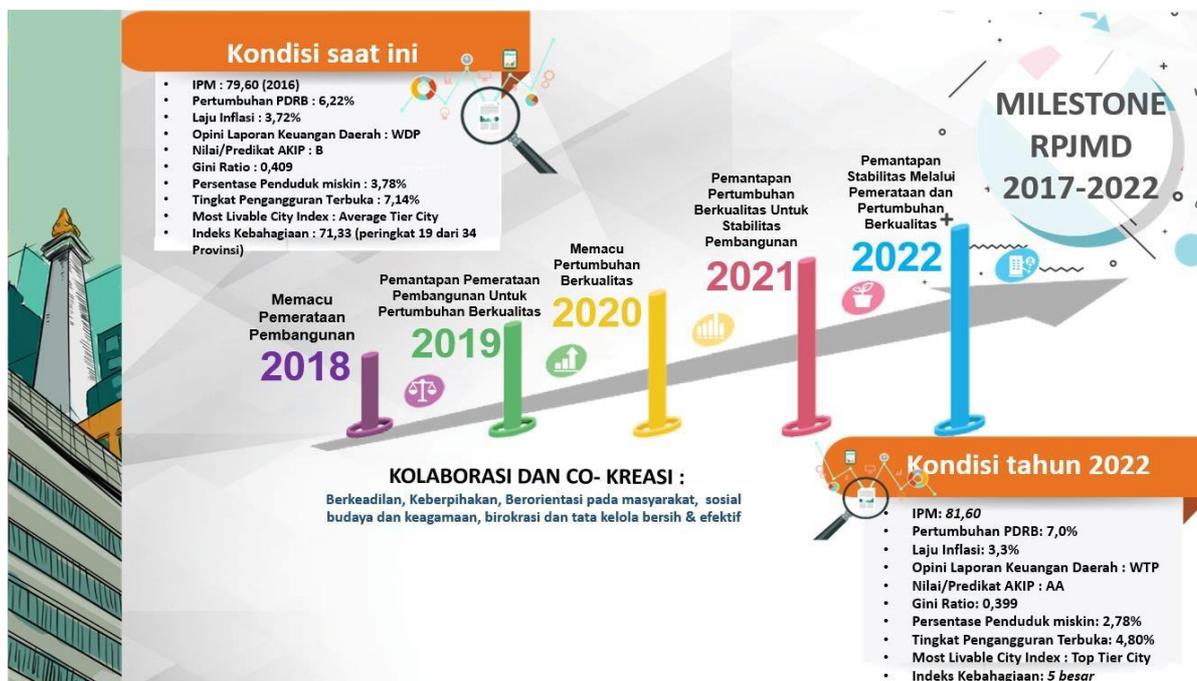
- 1) Misi Pertama : Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memansiasiakan
- 2) Misi Kedua : Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang
- 3) Misi Ketiga : Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas
- 4) Misi Keempat : Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.
- 5) Misi Kelima : Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) juga merupakan perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen pemerintahan diharapkan fokus pada peningkatan akuntabilitas serta peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome).

Di dalam Arah Kebijakan Pembangunan (*Milestone*) Pemprov DKI Jakarta Tahun 2017-2022, diketahui bahwa Predikat AKIP pada awal kondisi (2017) adalah Predikat B. Selanjutnya, pada tahun 2018 mulai ditargetkan Predikat A, dan akhirnya pada tahun 2022 ditargetkan mendapatkan Predikat AA.

Gambar 4

Arah Kebijakan Pembangunan Pemprov DKI Jakarta Tahun 2017-2022



Sumber: RPJMD Pemprov DKI Jakarta 2017-2022

Evaluasi yang dilakukan pada penelitian ini lebih difokuskan pada pencapaian target AKIP Pemprov DKI Jakarta untuk dua tahun terakhir (2019 dan 2018) dengan pertimbangan bahwa target AKIP 2018 dan 2019 lebih tinggi dari target tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan analisis dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemprov DKI Jakarta Tahun 2019 dan Tahun 2018, serta LKIP Bappeda DKI Jakarta Tahun 2019.

Berdasarkan LKIP Tahun 2018 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan Perjanjian Kinerja yang terdiri dari 10 Sasaran Strategi dan 13 Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada tabel 3 di bawah ini digambarkan realisasi atas target IKU yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Pemprov DKI Jakarta untuk Tahun Anggaran 2018.

Tabel 3
Realisasi Kinerja Pemprov DKI Jakarta TA 2018

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Prosentase
1	Sasaran Strategis 1: Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua			
	1	Indeks Pembangunan Manusia	80,00	Proses
2	Sasaran Strategis 2: Berkurangnya Tingkat Pengangguran			
	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,20	5,34
3	Sasaran Strategis 3: Tersedianya stok kebutuhan pangan yang terjamin jumlah dan mutunya serta terjangkau bagi masyarakat			
	1	Indeks Ketahanan Pangan	Ketersediaan 100%, Skor	Ketersediaan 100%, Skor

			Pola Pangan Harapan (PPH) skor 81	Pola Pangan Harapan (PPH) skor 86.7	
4	Sasaran Strategis 4: Terlaksananya pengentasan kemiskinan bagi seluruh masyarakat				
1	Tingkat Kemiskinan	3.58%	3.55%	100.85%	
5	Sasaran Strategis 5: Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi				
1	Jumlah Titik Genangan Banjir	12 titik	11 titik	109,09%	
6	Sasaran Strategis 6: Meningkatnya akses sanitasi layak				
1	Cakupan pelayanan air bersih	60.99%	60.33%	98.92%	
2	Persentase penurunan volume sampah di kota	14.00%	12,40%	88.57%	
7	Sasaran Strategis 7: Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan dan terjangkau bagi semua warga Jakarta				
1	Persentase perjalanan penduduk menggunakan sarana kendaraan bermotor umum (Public Transportation Modal Share)	20%	-	-	
8	Sasaran Strategis 8: Meningkatnya pertumbuhan investasi				
1	Realisasi Nilai Investasi	Rp. 93.10 Triliun	Rp. 114.2 triliun	122,67%	
9	Sasaran Strategis 9: Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel				
1	Nilai / Predikat AKIP	Predikat A	Predikat BB	75%	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,00	80,76	104,7%	
3	Opini Laporan Keuangan Daerah	Predikat WTP	Predikat WTP	100%	
10	Sasaran Strategis 10: Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya				
1	Jumlah kawasan pemukiman kumuh	223 RW	217 RW	102,76%	

Sumber: LKIP DKI Jakarta Tahun 2018

Berdasarkan Tabel Realisasi Kinerja Pemprov DKI Jakarta TA 2018 di atas diketahui bahwa capaian dari 13 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

- 7 IKU tercapai targetnya ($\geq 100\%$); Termasuk Opini atas Laporan Keuangan Daerah (LKPD) yang kemudian diketahui hasilnya pada tahun

2019 yaitu berhasil meraih Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

- 4 IKU belum mencapai targetnya (termasuk target Predikat Nilai A untuk AKIP);
- 2 IKU belum diketahui data hasilnya (masih dalam proses)

Selanjutnya, berdasarkan LKIP Tahun 2019 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dengan jumlah Sasaran Strategi dan IKU yang sama dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2018, namun tentunya berbeda dari sisi target IKU nya. Pada tabel 4 di bawah ini digambarkan realisasi dari target IKU yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Pemprov DKI Jakarta untuk Tahun Anggaran 2019.

Tabel 4

Perjanjian Kinerja dan Realisasi Kinerja Pemprov DKI Jakarta TA 2019

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Prosentase	
1	Sasaran Strategis 1: Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua				
	1	Indeks Pembangunan Manusia	80,40	80,76	100,4%
2	Sasaran Strategis 2: Berkurangnya Tingkat Pengangguran				
	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,10	5,13	99,42%
3	Sasaran Strategis 3: Tersedianya stok kebutuhan pangan yang terjamin jumlah dan mutunya serta terjangkau bagi masyarakat				
	1	Indeks Ketahanan Pangan	Ketersediaan 100%, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) skor 82	Ketersediaan 100%, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) skor 83	101,2%
4	Sasaran Strategis 4: Terlaksananya pengentasan kemiskinan bagi seluruh masyarakat				
	1	Tingkat Kemiskinan	3.38%	3.42%	98,83%
5	Sasaran Strategis 5: Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi				
	1	Jumlah Titik Genangan Banjir	7 titik	5 titik	140%
6	Sasaran Strategis 6: Meningkatnya akses sanitasi layak				
	1	Cakupan pelayanan air bersih	63.65%	63.16%	99.23%
	2	Persentase penurunan volume sampah di kota	17.00%	17,08%	100.5%
7	Sasaran Strategis 7: Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan dan terjangkau bagi semua warga Jakarta				
	1	Persentase perjalanan	22%	21.7%	98.64%

		penduduk menggunakan sarana kendaraan bermotor umum (Public Transportation Modal Share)			
8	Sasaran Strategis 8: Meningkatnya pertumbuhan investasi				
	1	Realisasi Nilai Investasi	Rp. 100.20 Triliun	Rp. 123.90 triliun	123,70%
9	Sasaran Strategis 9: Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel				
	1	Nilai / Predikat AKIP	Predikat A (81)	Predikat BB (73,8)	91,16%
	2	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,00	84,41	101,7%
	3	Opini Laporan Keuangan Daerah	Predikat WTP	Proses	Proses
10	Sasaran Strategis 10: Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya				
	1	Jumlah kawasan pemukiman kumuh	223 RW	217 RW	102,76%

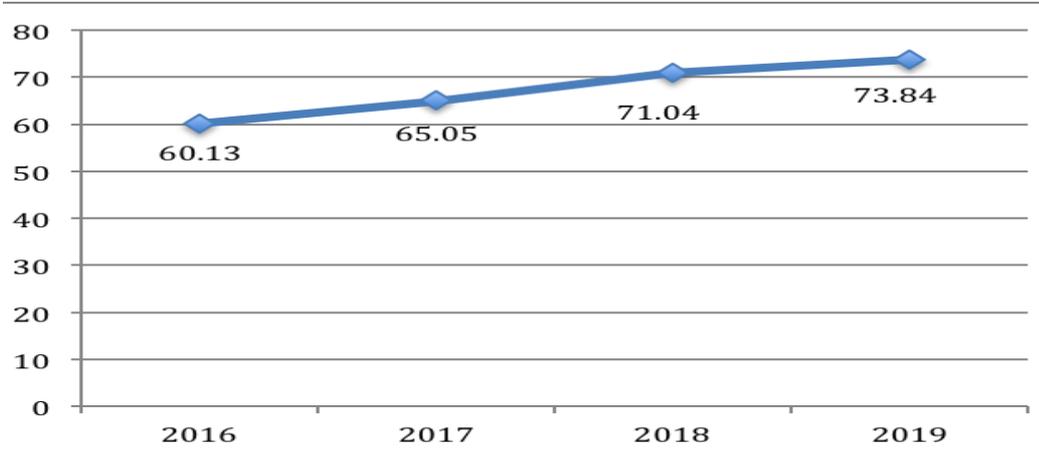
Sumber: LKIP DKI Jakarta Tahun 2019

Berdasarkan Tabel Realisasi Kinerja Pemprov DKI Jakarta TA 2018 di atas diketahui bahwa capaian dari 13 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

- 8 IKU tercapai targetnya ($\geq 100\%$); Termasuk Opini atas Laporan Keuangan Daerah (LKPD) yang kemudian diketahui hasilnya pada tahun 2020 yaitu berhasil meraih Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).
- 5 IKU belum mencapai targetnya (termasuk target Predikat Nilai A untuk AKIP).

Nilai AKIP Pemprov DKI Jakarta yang digambarkan pada Gambar 5 di bawah ini, menunjukkan trend nilai yang meningkat selama empat tahun terakhir. Namun demikian, belum berhasil mendapat target nilai yang diinginkan sebagaimana telah diinformasikan pada Tabel 2 di atas. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan adanya sejumlah perbaikan di dalam penyelenggaraan SAKIP Pemprov DKI Jakarta.

Gambar 5.
Grafik Nilai AKIP Pemprov DKI Jakarta Periode 2016 sd 2019



Sumber: Diolah dari LKIP Pemprov DKI Jakarta Periode 2016 sd 2019.

Predikat Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diberikan oleh KemenPANRB sebagai tergambar pada Grafik di atas adalah berdasarkan hasil evaluasi terhadap 5 (lima) komponen di dalam penyelenggaraan Sistem AKIP (SAKIP). Nilai performa dari lima komponen SAKIP untuk Pemprov DKI Jakarta berdasarkan hasil penilaian KemenPANRB untuk empat tahun terakhir digambarkan pada Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4
 Nilai per Komponen AKIP Pemprov DKI Jakarta

No.	Komponen yang Dinilai	Nilai			
		2016	2017	2018	2019
1	Perencanaan Kinerja	20,85	21,06	22,16	25,26
2	Pengukuran Kinerja	11,63	15,16	18,32	18,54
3	Pelaporan Kinerja	10,21	10,23	10,64	10,64
4	Evaluasi Internal	6,06	6,31	6,57	6,62
5	Capaian Kinerja	11,38	12,29	13,35	12,78
	Nilai Angka Hasil Evaluasi	60,13	65,05	71,04	73,84
	Nilai Huruf Hasil Evaluasi	B	B	BB	BB
	Target Nilai AKIP	BB	BB	A	A

Sumber: Diolah dari LKIP BAPPEDA DKI Jakarta Tahun 2019

Inspektorat melakukan evaluasi internal atas penyelenggaraan SAKIP Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang dilaksanakan pada bulan Agustus s.d. September tahun 2018 dengan hasil evaluasi yang dapat diinterpretasikan bahwa nilainya masih cukup bervariasi dalam rentang “Cukup” (nilai CC) hingga “Sangat Baik” (nilai BB). Namun demikian, sebanyak 56% dari 25 OPD yang dievaluasi masih berpredikat CC.

Berdasarkan hasil observasi pada aplikasi e-SAKIP Pemprov DKI Jakarta yang dapat diakses pada alamat https://sakip.jakarta.go.id/prod_2020_murni/pilih/index/?MENU_ID=01, dengan melakukan pengecekan secara acak pada beberapa pohon kinerja (cascading sasaran RPJMD ke program dan kegiatan beserta IKU nya), diperoleh simpulan sebagai berikut:

- 1) Indikator dan Target Kinerja Sasaran Strategis (SS) RPJMD sudah diinput pada aplikasi SAKIP untuk setiap tahunnya, mulai Tahun 2018 sd 2022;
- 2) Rencana Kinerja Tahunan SKPD belum semua diinput pada aplikasi SAKIP.

- 3) Perjanjian Kinerja Tahunan SKPD belum semua diinput pada aplikasi SAKIP.
- 4) Indikator dan Target Kinerja Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD belum semua diinput pada aplikasi SAKIP, dengan keragaman yang ditemukan, antara lain yaitu:
 - a) Indikator dan Target Kinerja Program dan Kegiatan sudah ditentukan/disikan pada aplikasi untuk setiap tahunnya, mulai Tahun 2018 sd 2022, dengan kemungkinan VALID;
 - b) Indikator dan Target Kinerja Program dan Kegiatan sudah ditentukan/disikan pada aplikasi untuk setiap tahunnya, mulai Tahun 2018 sd 2022, dengan kemungkinan TIDAK VALID, dimana angka target kerjanya ditentukan dengan angka yang sama setiap tahunnya mulai tahun 2018 sd. 2022;
 - c) Indikator dan Target Kinerja Program dan Kegiatan BELUM TERISI pada aplikasi e-SAKIP.

Berdasarkan dokumentasi hasil evaluasi atas penyelenggaraan SAKIP Pemprov DKI Jakarta yang dilakukan oleh Tim Evaluator dari KemenPANRAB diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a) Berbagai rekomendasi perbaikan yang telah sampaikan pada tahun sebelumnya, belum ditindaklanjuti secara menyeluruh sehingga belum terdapat kemajuan yang berarti dalam perbaikan manajemen kinerja;
- b) Sasaran strategis dan indikator kinerja yang terdapat dalam dokumen RPJMD dan dokumen Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD/SKPD) sudah berorientasi hasil. Kualitas indikator sasaran sudah memenuhi kriteria SMART, namun kualitas indikator tujuan untuk mengukur capaian jangka menengah (5 tahun) di level OPD masih belum optimal, terutama dari tingkat kecukupan indikator untuk mengukur ketercapaian tujuan;
- c) Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah dijabarkan (*cascading*) ke dalam kinerja setiap OPD, namun baru sebagian OPD yang telah menjabarkan kinerja (*cascading*) sampai dengan kinerja level eselon IV dan kualitas dari penjabaran kinerja tersebut masih perlu disempurnakan lagi;
- d) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan perencanaan (*e-planning*) dan penganggaran (*e-budgeting*) berbasis elektronik dan terintegrasi. Pengukuran kinerja individu juga dilakukan secara elektronik dan dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward and punishment* melalui aplikasi *e-kinerja*, namun keselarasan antara ukuran kinerja individu dengan ukuran kinerja organisasi dalam Perjanjian Kinerja belum dapat diyakini kebenarannya. Aplikasi e-sakip jakarta yang telah dibangun (*sakip.jakarta.go.id*), juga baru dimanfaatkan dalam mengkompilasi dokumen perencanaan dan menyelaraskan keterkaitan perencanaan di level Provinsi dan level OPD, dan belum dimanfaatkan dalam mengukur capaian kinerja;
- e) Laporan kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyajikan analisis pencapaian kinerja, namun belum menyajikan perbandingan data kinerja tahun berjalan dan tahun sebelumnya, serta analisis efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja. Selain itu, indikator kinerja utama (IKU) tidak semua ada di dalam perjanjian kinerja, sehingga laporan kinerja hanya melaporkan kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja yang tidak mencakup semua indikator di dalam IKU.
- f) Di tingkat OPD, sebagian besar OPD belum menyajikan laporan kinerja dengan

baik sesuai kaidah PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014;

- g) Inspektorat Provinsi DKI Jakarta telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP OPD, tetapi simpulan hasil evaluasi belum menggambarkan kondisi penerapan SAKIP dan belum mampu memberikan *feedback* kepada OPD.

Adapun berdasarkan hasil FGD, diperoleh informasi sejumlah kelemahan atau kendala yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan SAKIP, sehingga menyebabkan belum tercapainya target predikat AKIP Pemprov DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

1) Hasil Evaluasi Tim Penyelenggara SAKIP (Inspektorat dan Bappeda Provinsi DKI Jakarta)

- a) Pemprov DKI Jakarta belum memiliki Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP, saat ini (tahun 2020) sedang disusun Pergub tersebut.
- b) Pemprov DKI Jakarta belum menerapkan pendekatan *Balaced Scorecard* dalam pemetaan strateginya sebagaimana dianjurkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017.
- c) Pengetahuan pegawai mengenai dasar-dasar manajemen kinerja atau budaya kinerja masih kurang.
- d) Aplikasi e-SAKIP Pemprov DKI Jakarta belum dimanfaatkan secara penuh dan terintegrasi dalam penyelenggaraan SAKIP
- e) *Cascading* Sasaran Strategis (SS) dari RPJMD ke Renstra/Renja SKPD dan *cascading* indikator kinerjanya pada SS, program dan kegiatan di SKPD masih perlu dibenahi sehingga menjadi lebih selaras dan terukur.
- f) Indikator dan target kinerja pada dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Keuangan (RKA) SKPD sebagian masih belum sinkron.

2) Pendapat Ahli (Suyuti Marzuki)

Suyuti mengemukakan permasalahan yg masih sering terjadi dan menjadi temuan dari KemenPANRB, yaitu kekeliruan dalam 3 hal berikut:

- 1) Perumusan Peta strategi pada RPJMD;
- 2) Perumusan Peta strategi pada Restra Organisasi Perangkat Daerah (OPD); dan
- 3) Perumusan Perjanjian kinerja secara berjenjang.

Menurut Suyuti, tiga (3) poin ini yg diminta KemenPANRB, namun masih menjadi temuan setiap tahunnya sehingga nilai reformasi birokrasi atau nilai SAKIP tidak bisa naik.

Di samping itu, Suyuti juga mendorong penggunaan 4 (empat) perspektif *Balanced Scorecard* (BSC), sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Lebih lanjut menurut Suyuti, penggunaan BSC penting karena selama ini ketika membangun pohon kinerja (*cascading* sasaran dan IKU) banyak yang tidak jelas hubungan keterkaitannya antara Sasaran dan IKU di tingkat Pemda (Kepala Daerah) dengan Sasaran dan IKU dari OPD dan unit kerja bawahannya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kondisi penyelenggaraan SAKIP di Pemprov DKI Jakarta sebagaimana telah diuraikan di atas, maka saran yang dapat diajukan dari hasil penelitian ini untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan SAKIP khususnya di Pemprov DKI Jakarta, antara lain sebagai berikut:

- a) Segera menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP. Hal ini penting untuk mengurangi persepsi pemahaman yang masih berbeda-beda diantara pegawai khususnya bagi para manajer kinerja organisasi di seluruh perangkat daerah.

- b) Memperbaiki *Cascading* Sasaran Strategis (SS) dari RPJMD ke Renstra/Renja SKPD dan *cascading* indikator kinerjanya pada SS, program dan kegiatan di SKPD sehingga menjadi lebih selaras dan terukur.
- c) Memanfaatkan Aplikasi e-SAKIP secara penuh dan terintegrasi, mulai dari perencanaan kinerja hingga pengukuran kinerja.
- d) Menyinkronkan indikator dan target kinerja pada dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Keuangan (RKA) SKPD.
- e) Meningkatkan kualitas laporan kinerja di tingkat Provinsi maupun unit kerja, khususnya dalam hal penyajian analisis capaian kinerja, perbandingan data kinerja yang memadai selama tahun berjalan dan tahun sebelumnya, dan penyajian informasi efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja.
- f) Laporan kinerja di tingkat Provinsi, hendaknya melaporkan pencapaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja yang di dalamnya mencakup semua indikator di dalam IKU. Selain itu perlu adanya pemanfaatan informasi kinerja dalam laporan kinerja oleh pimpinan secara berjenjang sehingga dapat digunakan umpan balik (*feedback*) perbaikan perencanaan, pelaksanaan program/kegiatan, serta peningkatan kinerja;
- g) Meningkatkan kualitas evaluasi AKIP OPD oleh Inspektorat Provinsi sehingga dapat mendorong perbaikan dalam Implementasi SAKIP oleh Perangkat Daerah secara signifikan.
- h) Meningkatkan kompetensi pegawai khususnya para manajer kinerja organisasi perangkat daerah melalui bimbingan teknis manajemen kinerja organisasi.
- i) Mempertimbangkan untuk mengadopsi penggunaan metode *Balanced Scorecard* (BSC) agar di dalam membangun pohon kinerja (*cascading* sasaran dan IKU) menjadi lebih terarah dan jelas hubungan keterkaitannya antara Sasaran dan IKU di tingkat Pemda (RPJMD dan RKPD) dengan Sasaran dan IKU dari OPD (Renstra dan Renja) dan unit kerja bawahannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Aziz, Muh. Irfandi. 2020. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidu. *Jurnal Ekonomika*. Vol 11, No. 1
- Bovens, Mark. 2006. Analysing and Assessing Public Accountability: Conceptual Framework. *European Governance Papers*. <http://www.connex-network.org/eurogov/pdf/egp-connex-C-06-01.pdf>.
- Bovens, M., Schillemans, T. and Hart, P. 't (2008) 'Does Public Accountability Work? an Assessment Tool', *Public Administration*, 86(1), 225–42.
- Christensen, T., A. Lie and P. Laegreid. 2008. Beyond New Public Management: Agencification And Regulatory Reform In Norway. *Financial Accountability and Management*, 24 1., 0267- 4424.
- Creswell, John. W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. 4th edition. Los Angeles: Sage Publications
- Denhardt, R. B. dan J. V. Denhardt. 2000. The New Public Service: Serving Rather Than Steering. *Public Administration Review*, vol. 60, No. 6, pp. 549–559.
- Dubnick, M. (2005) 'Accountability and the Promise of Performance: In Search of the Mechanisms', *Public Performance & Management Review*, 28(3), 376–417
- Dubnick, M. J. dan Frederickson, H. G. 2011. *Public Accountability: Performance*

- Measurement, The Extended State, and the Search for Trust. *National Academy of Public Administration/ Kettering Foundation*
- Fryer, Karen, Jiju Antony, dan Susan Ogden. 2009. Performance Management Practices in Public Sector. *International Journal of Public Sector Management*, Vol. 22 Issue: 6, pp.478-498
- Kloot Louise dan John Martin. 2000. Strategic performance management: A balanced approach to performance management issues in local government. *Management Accounting Research*, 11, 231-251
- Romzek, B. S. 2000. Dynamics of Public Sector Accountability in an Era of Reform. *International Review of Administrative Sciences*, 66(1), 21-44
- Verbeeten, Frank. H.M. (2008). Performance management practices in public sector organizations: Impact on Performance. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 21 Iss 3 pp. 427 - 454
- Yin, Robert. K. 2009. *Case Study Research: Design and Methods*. 4th edition., Los Angeles: Sage Publications.
- Yin, Robert. K. 2011. *Qualitative Research from Start to Finish*. New York: The Guilford Press
- Yusrianti Hasni, Reka Hendra Safitri. 2015. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*. Vol. 13 No. 4
- B. Peraturan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022.

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022.

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 67 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 71 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 161 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017.

C. Referensi lainnya

KemenPANRB. <https://www.menpan.go.id>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. <https://ppid.jakarta.go.id/laporan-kinerja-instansi-pemerintah>